

STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM WANITA

PENGANTAR

Sejak PJPT II telah digariskan bahwa wanita (selanjutnya disebut perempuan) sebagai mitra seiaiar Pria dalam pembangunan harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya. Wanita sebagai mitra sejajar pria harus lebih dapat berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan iklim budaya yang mendukung agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan kemampuan, keahlian dan ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum perempuan.

Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pengintegrasian kebutuhan gender dalam kegiatan pembangunan merupakan kebutuhan dan sebagai upaya strategis bagi perempuan untuk meningkatkan kemitra-sejajarannya dengan pria.

Tulisan ini bermaksud menielaskan bagaimana pengembangan sumberdaya manusia (SDM) perempuan di Indonesia dalam rangka pemberdayaan mereka menghadapi tugas-tugas pembangunan di masa datang.

PENGERTIAN DAN ANALISIS GENDER

Pengertian gender, yang pertama mengaeu pada sistem peran dan pola hubungan antara pria dan wanita yang ditentukan tidak berdasarkan biologi, akan tetapi konteks sosial, politik dan ekonomi. Kedua, menunjuk pada perbedaan sifat wanita dan pria yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan

wanita dan pria dalam kehidupan pribadi dan dalam setiap bidang masyarakat.

Analisis gender membedakan antara pengertian wanita dalam pembangunan (*Women In Development/ WID*) dan *Gender and Develogment/GAD* (gender dan pembangunan). Dua pengertian ini masing-masing mempunyai perbedaan.

WID, mengandung unsur- unsur:

1. Pendekatan
Pandangan bahwa yang menjadi sumber permasalahan ada pada perempuan.
2. Fokus
Perempuan
3. Masalah
Tidak berperansertanya perempuan dalam proses pembangunan.
4. Tujuan
Pembangunan yang lebih efektif dan efisien
5. Pemecahan
Mengintergrasikan perempuan dalam proses pembangunan
6. Strategi
 - Proyek-proyek untuk perempuan
 - Kegiatan proyek khusus perempuan
 - Proyek-proyek terpadu
 - Meningkatkan produktivitas perempuan
 - Meningkatkan ketrampilan perempuan dalam mengurus rumah tangga

GAD (*Gender And Development*), mengandung pengertian:

1. Pendekatan
Pandangan yang menganggap bahwa sumber permasalahan ada pada pembangunan.

2. Fokus

Pola relasi lelaki-Perempuan

3. Masalah

Ketidak sejajaran hubungan kekuasaan (kaya-miskin, perempuan-lelaki) menyebabkan berlangsungnya pembangunan yang tidak adil dan tidak berperansertanya perempuan secara maksimal

4. Tujuan

Pembangunan yang tidak adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan.

5. Pemecahan

- Memperkuat (*empowering*) perempuan yang terpinggir/marginal
- Mengubah pola-pola hubungan yang tidak seiaian

6. Strategi

- Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana didefinisikan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka
- Bersama dengan itu, ditangani juga kebutuhan strategi perempuan
- Menangani kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat
- Mengacu kepada perubahan struktural

PEKERJA DAN PEKERJAAN PEREMPUAN

Berdasarkan data hingga tahun 1987, dari seluruh penduduk perempuan yang berusia diatas 10 tahun hanya 20-30% yang bekerja.

Dari angka-angka partisipasi perempuan dalam kerja yang terekam dalam angka-angka statistik yang sering menimbulkan pertanyaan karena dihadapkan dengan kenyataan yang ada, angka-angka itu. terlalu. kecil. Hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa prosentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja hampir mencapai angka 40. Meskipun terjadi kenaikan dalam persentase, akan tetapi angka tersebut tetap masih *under represent* terhadap kenyataan yang ada.

Suatu contoh untuk melihat peran dan partisipasi perempuan dalam kerja (terutama di usaha kecil) harus diakui masih sering terabaikan.

Apa yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi perempuan dalam kerja sebagaimana tercantum dalam angka-angka resmi? Beberapa hal secara bersama-sama menjadi alasannya. Hal yang *pertama* menyangkut persepsi mengenai kerja (yang dilakukan) perempuan dikaitkan dengan peran domestik perempuan; *kedua*, keterkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan atau pendefinisian pekerjaan perempuan dan yang *ketiga* adalah sifat musiman, paruh waktu informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan (Utrecht dalam Tjandraningsih, 1996).

Ideologi yang mewarnai persepsi mengenai pekerjaan perempuan selalu menempatkan kerja perempuan dalam, konteks kegiatan rumah tangga. Seperti juga yang dinyatakan Utrecht (*ibid*), mengingat sebagian besar kegiatan kerja perempuan terutama dipedesaan dilakukan sekitar rumah tangga, maka tidak mudah untuk secara tegas memisahkan jenis atau sifat dalam kelompok pasar atau non pasar, ekonomi atau non ekonomi, produksi atau reproduksi. Kesulitan tersebut kemudian menimbulkan simplifikasi pendefinisian pekerjaan perempuan.

Apabila perempuan banyak melakukan pekerjaan dengan status buruh rumahan, hal itu merupakan perwujudan ideologi gender dan pembagian kerja seksual dalam masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan dasar munculnya karakteristik buruh rumahan yakni berupah murah, tanpa jaminan kelangsungan pekerjaan, tanpa jaminan sosial, tanpa posisi tawar dan tidak terjangkau oleh regulasi ketenaga kerjaan. Karakteristik tersebut merupakan manifestasi sekali lagi dari asumsi dan persepsi mengenai perempuan dan kerja. Hal ini termasuk di dalamnya tidak pernah diperhitungkannya status ibu rumah tangga yang bekerja sambil di rumah. Dari data (BPS, 1985) presentasi jumlah perempuan dan laki-laki usia 10 tahun keatas yang berjumlah 34 % tenaga kerja Indonesia yang bekerja mengurus rumah tangga adalah 33,7 % dibanding 0,3 %. Jumlah tersebut cukup banyak, dan hal itu tidak pernah dianggap penting sebagai bekerja dalam terminologi profesi).

Perempuan memilih menjadi pekerja rumahan atau ibu rumah tangga yang bekerja sambil di rumah, karena penghasilan yang diperoleh suaminya atau anggota keluarga lelaki lain di dalam rumah tangga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja di rumah juga dilakukan kaum perempuan dengan tujuan ganda yakni memperoleh penghasilan sambil memastikan diri bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik tetap terlaksana sebagai mana yang diharapkan. Meskipun demikian pekerjaan yang mereka lakukan masih sering dipandang sebagai pengisi waktu luang atau pekerjaan sampingan yang menunjukkan posisi ekonomi yang subordinat.

Masalah yang lainnya lagi adalah mereka yang bekerja di luar rumah: di perusahaan, lembaga, atau sektor formal lainnya, sering mendapat imbalan gaji yang berbeda dengan laki-laki, sungguhpun keahliannya sama.

PEMBERDAYAAN SDM PEREMPUAN

1. Strategi meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan: Strategi ini menjadi strategi dominan di tahun 70-an. Setelah PBB menetapkan dekade pertama pembangunan kaum perempuan, sejak saat itulah hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan kementerian Peranan Wanita, dengan fokus utama meningkatkan peran wanita dalam pembangunan.

Strategi peningkatan peran wanita dalam pembangunan ini didasarkan pada suatu analisis yang lebih memfokuskan pada kaum perempuannya. Meskipun analisis ini sudah banyak ditinggalkan, namun analisis *mainstream* ini telah menjadi aliran yang mendominasi kalangan pemikir pembangunan dan birokrasi. Strategi berfokus pada kaum perempuan ini pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwasanya permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Oleh karena itu bagi analisis ini, harus ada usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan.

Sebagai reaksi selanjutnya banyak perencanaan pembangunan tidak saja memanfaatkan perempuan yang jumlahnya separuh lebih dari penduduk bumi demi untuk mengefektifkan pembangunan, namun juga meletakkan perempuan sebagai target pembangunan, dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Gagasan ini telah melahirkan diskursus baru *women in development*, atau yang lebih dikenal dengan WID.

Berbagai usaha telah dilakukan melalui pelatihan peningkatan ketrampilan perempuan, seperti mengembangkan program PKK untuk membuat kaum perempuan berperan selain reproduksi di sektor domestik juga di sektor produktif dan publik.

Sebagian dari usaha ini dapat dilihat misalnya dalam program WID yakni dengan menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, ket-rampilan serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan wanita untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan itu *problemata* terletak pada kaum perempuan sendiri, dan oleh karenanya diperlukan usaha untuk menggarap kaum perempuan.

2. Strategi Pemberdayaan Perempuan: beranggapan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor produktif memang perlu, tetapi tidak selalu akan menaikkan status perempuan.

Melibatkan perempuan dalam pembangunan tidak serta merta membawa pada pemberdayaan perempuan. Perempuan harus ditempatkan sebagai subyek yang menikmati hasilnya dan ikut menentukan, serta bukan subordinatif saja.

Strategi ini tidak saja menekankan pada persoalan perempuan saja, tetapi juga faktor dan sistim yang melingkupinya dan mengungkungnya tidak bisa berdaya. Persoalannya adalah bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang menghambat pemberdayaan perempuan. Inilah yang kemudian dikenal dengan "analisis gender".

Agenda dari strategi ini adalah tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis untuk merubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan posisi kaum perempuan yang sering dihegemoni oleh posisi laki-laki, terutama yang telah termanifestasi dalam sistim sosialnya. Kesan-kesan yang mempersepsikan bahwa perempuan lemah perlu diubah atas dasar keadilan sosial.

Sebagian dari usaha ini misalnya adanya penyelenggaraan pelatihan sensitivitas gender, analisis gender, dan sadar gender, tidak saja dikalangan perempuan tetapi juga lelaki.

Kedua strategi tersebut, semuanya memperhatikan bagaimana SDM perempuan berkembang optimal, sehingga perempuan mendapatkan perlakuan adil di masyarakat luas.

Dalam perkembangannya, kini sedang dikritik dua strategi diatas yang mengarah pada "*gender mainstreaming*" dengan memerankan organisasi dan institusi atau negara untuk mempercepat gerakan pemberdayaan perempuan, melalui gerakan advokasi, studi, dan perencanaan kebijakan.

AGENDA PEMBERDAYAAN DI MASA DATANG

Memerangi ketidakadilan sosial dalam masyarakat, selalu menjadi tema menarik dan menjadi tema penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan di masa datang.

Menurut Fakhri (1996), terdapat dua agenda ke depan yang diusulkan, yakni: pertama, mengintegrasikan gender kedalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan dan kedua, strategi advokasi. Untuk yang pertama, diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan managemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender atau gender policy bagi setiap organisasi. Ini berarti bahwa upaya-upaya penanganan masalah perempuan harus dikembangkan secara struktural dan sistemik seiring dengan perkembangan kelembagaan setiap organisasi maupun institusi pendidikan. Suatu kebijakan yang tegas mulai harus dikenalkan, misalnya kebijakan gender *staff recruitment* dan *staff*

development, manajemen dan perencanaan program yang berwawasan gender, serta pengembangan kurikulum pendidikan yang berperspektif gender.

Sedangkan untuk strategi ke dua yakni advokasi, diperlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Strategi ini antara lain mempersiapkan perjuangan melalui perubahan hukum dan pelaksanaannya. Hal ini perlu diketahui letak masalahnya apakah berada dalam substansi hukum, baik hukum yang tertulis seperti perundang-undangan negara maupun tafsiran agama dalam fikih, ataupun hukum yang tak tertulis seperti hukum adat. Apabila persoalannya disana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesak alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua, jika persoalannya terletak pada kultur hukum (*culture of the law*), artinya kultur masyarakat dalam menaati hukum, maka strategi yang dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur hukum (*structure of the law*), maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum tentang masalah ketidakadilan gender.

Akhirnya, bahwa usaha memperjuangkan perbaikan pemberdayaan kaum perempuan tidaklah sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki, karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki saja, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat (rk).

DAFTAR BACAAN

BPS. 1985. Indikator Sosial Wanita Indonesia: Jakarta

Fakih, Mansour, 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Tjandraningsih, Indrasari.1996. "Pekerja Perempuan Dalam Globalisasi Ekonomi" Jurnal Analisis Sosial, Akatiga: Bandung.

